

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCIPTAAN PRODUK YANG
KOMPETITIF**

(Studi Kasus Pada Industri Krecek di Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

TRI YULIANTI

A220120023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCIPTAAN PRODUK YANG
KOMPETITIF
(Studi Kasus Pada Industri Krecek di Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

TRI YULIANTI

A220120023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,



(Agus Prasetyo, S.Pd,M.Pd)

NIK/NIP: DTT 1040

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCIPTAAN PRODUK YANG
KOMPETITIF**

(Studi Kasus Pada Industri Krecek di Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)

OLEH:

TRI YULIANTI

A220120023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
pada hari Senin (8 Agustus 2016)
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Agus Prasetyo. S.Pd,M.Pd.
2. Dr. A hamad Muhibbin.M.Si
3. Drs. Achmad Muthali'in.M.Si

(.....
.....
.....)

Dekan,



Prof. Dr. Harnu Joko Prayitno, M.Hum

NIP. 19650428281993030

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Agustus 2016

Penulis



Tri Yulianti

A220120023

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCIPTAAN PRODUK YANG
KOMPETITIF**
(Studi Kasus Pada Industri Krecek Di Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola pemerintahan desa dalam penciptaan pasar yang kompetitif di Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali berikut kendala dan solusinya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam penciptaan pasar yang kompetitif. Masih terdapat kendala dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dalam penciptaan pasar yang kompetitif mulai dari perangkat desa yang kurang dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada para pemilik industri rumah tangga. Selain itu mencul dari pemilik industri rumah tangga yang kurang memperhatikan kualitas produk, masih berbuat curang serta belum mempunyai surat izin usaha.

Kata kunci : Tata kelola pemerintahan, Desa, Penciptaan Pasar yang Kompetitif.

**VILLAGE GOVERNMENT EFFORTS IN THE CREATION OF COMPETITIVE
PRODUCTS**
(A Case Study in Industrial krecek Gladagsari the District Ampel , Boyolali Regency)

Abstract

The purpose of this study was to describe the village governance efforts in the creation of a competitive products in the village Gladagsari Ampel Boyolali District of the following problems and solutions. This research was qualitative. Data collection techniques used in this research is by interview, observation, and study documents or archives. Techniques for testing the validity or authenticity of data is done by means of triangulation, results showed that the village government has been carrying out its responsibilities in accordance with aspects of good governance (*good governance*), especially in the creation of a competitive market. Still constraints in implementing governance in the creation of a competitive market starting from the village is lacking in disseminating information and guidance to the owners of domestic industry. Comes up from the owner's household industry less attention to product quality, they cheat and do not have a business license.

Keywords : Governance , Village , Creation of a Competitive Market.

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki arti penting. Desa bisa dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul,serta adat istiadat setempat yang dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya adalah sebagai petani.

Desa berada di bawah pemerintah kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa, sekaligus merupakan ujung tombak kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintahan. Menurut Yudhoyono (dalam Kurlinawati, 2009:32-33), dari segi fungsional terkait apakah pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan efisien. Dari segi pemerintahan, tata kelola dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek tersebut seperti hukum, *administrative*, desentralisasi, dan penciptaan pasar yang kompetitif. Penelitian Darmastuti (2014) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Provinsi Lampung tidak hanya berbeda regional, tetapi juga di dalam fungsi antar-sektor. Semua tiga kabupaten tampil buruk di antar-sektor fungsi informasi dan komunikasi, dan ketiga dilakukan terbaik dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal otonomi daerah, *single* resep desentralisasi simetris yang berlaku sama di seluruh Indonesia perlu diganti dengan desentralisasi asimetris.

Berdasarkan pra survai yang dilakukan peneliti tanggal 20 Januari 2016, di Desa Gladagsari terdapat pengusaha kecil bergerak di bidang industri rumah tangga (*home industry*) yang menjual produk sama. Salah satu contohnya adalah di Dukuh Mrawun ada beberapa kepala keluarga yang mempunyai usaha sama, yaitu industri krecek kulit sapi. Pemerintah desa diharapkan dapat memaksimalkan tata kelola, terutama untuk menciptakan persaingan (kompetitif) di antara para pemilik *home industry* tersebut. Langkah yang dilakukan dengan cara penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil (*home industry*),

penentuan deregulasi (proses tindakan penghapusan pembatasan atau tindakan peniadaan peraturan), serta pengelolaan kebijakan makro ekonomi.

Kenyataannya di desa Gladagsari, pemerintah desa masih kurang maksimal dalam hal penciptaan pasar yang kompetitif di antara para pemilik *home industry* tersebut. Ada berbagai kendala antara lain para pemilik *home industry* menetapkan harga yang berbeda. Tempat distribusi yang sama, tetapi kualitas harga yang ditetapkan tersebut berbeda dikarenakan kualitas barangnya berbeda. Kegigihan dan ketelatenan para pemilik *home industry* dalam proses produksi juga berbeda. Ada pemilik usaha yang terkesan tidak memperdulikan kualitas produk, namun ada yang rajin dan teliti dalam mempertahankan kualitas produk. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa untuk sekedar memberikan sosialisasi kepada pemilik *home industry*, juga terkait dengan penciptaan pasar yang kompetitif.

Realitas di atas menunjukkan masih kurang maksimalnya pemerintah desa untuk mengelola tata pemerintahannya dalam penciptaan pasar yang kompetitif. Pemerintah desa sebagai instansi pemerintah seharusnya dapat mengelola pemerintahannya dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai upaya pemerintahan desa dalam penciptaan produk yang kompetitif.

Penelitian Yang Relevan

Penelitian Triki dan Chun (2011) Menunjukkan Bahwa akuisisi tidak menguntungkan dan hanya mondar-mandir dalam sebuah transaksi . Mereka juga menemukan bahwa akuisisi yang dilakukan di negara ditandai dengan kuatnya sistem hukum, sementara ketidaktidak stabilan ekonomi menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Menariknya, tingkat korupsi tidak mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Sebelumnya Pengalaman di Afrika akuisisi ukuran papan tampaknya signifikan dengan faktor penentu kinerja yang dilaporkan. Hasil penelitian kontras dengan pandangan bahwa kerangka hukum yang kuat mengurangi kemampuan *acquirers* untuk membuat keuntungan yang besar.

Penelitian Stankowska (2014) menunjukkan nilai-nilai good governance dan kegiatan organisasi non pemerintah, bagaimana dua entitas ini berinteraksi satu sama lain. Pertama-tama , melalui definisi, bagaimana tata kelola yang baik dan bagaimana dipahami dalam lingkungan yang berbeda. Mengapa sangat penting bagi banyak masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai good governance di semua sektor dari kehidupan publik dan privet, selain itu keduanya memiliki arti yang berbeda di hampir setiap kebudayaan. Kedua, menganalisis peran

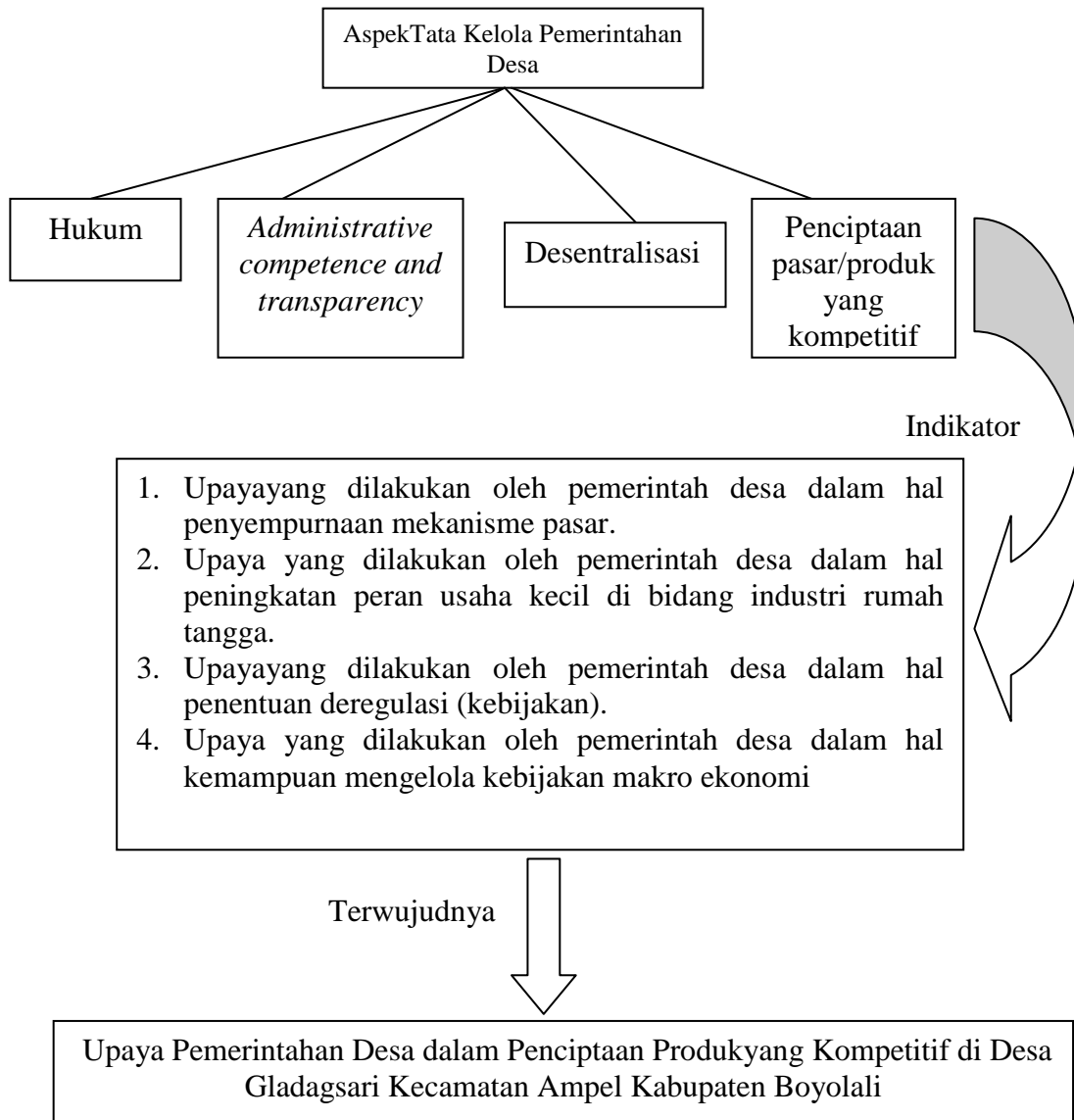
LSM di semua bidang serta mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan bagaimana peran ini dipahami di forum internasional.

Penelitian Kasmadsi (2015) menunjukkan bahwa kepentingan dan kebutuhan PKL tidak terpenuhi melalui vendor kebijakan pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya forum akuntabilitas sebagai tempat kebersamaan semua PKL *stakeholder*. Pemberdayaan PKL kebijakan pemberdayaan di Kota Makassar dirancang pada pendekatan *top-down*, sehingga dianggap sebagai obyek yang harus menerima semua program pemerintah yang ditujukan.

Penelitian Kamal, Romle dan Yusof (2015) menunjukkan bahwa keperdulian pemerintahan telah menjadi penting dan menjadi isu penting bagi masyarakat di berbagai sektor khususnya di Malaysia. Sebagian besar pemimpin pemerintahan telah menekankan untuk lebih fokus pada isu-isu pemerintahan, yang menyerukan *sektor publikator* untuk bekerja di sistem *check and balance*. Selanjutnya pelayanan publik, termasuk profesional kelompok manajemen dan kelompok pendukung dianjurkan untuk meniru sistem nilai yang lebih banyak membahas tentang masalah etika, keterbukaan, akuntabilitas, *transparency* dan keutuhan di sektor publik. Penelitian untuk mengusulkan studi *good governance* pada kinerja organisasi di Malaysia sektor publik .

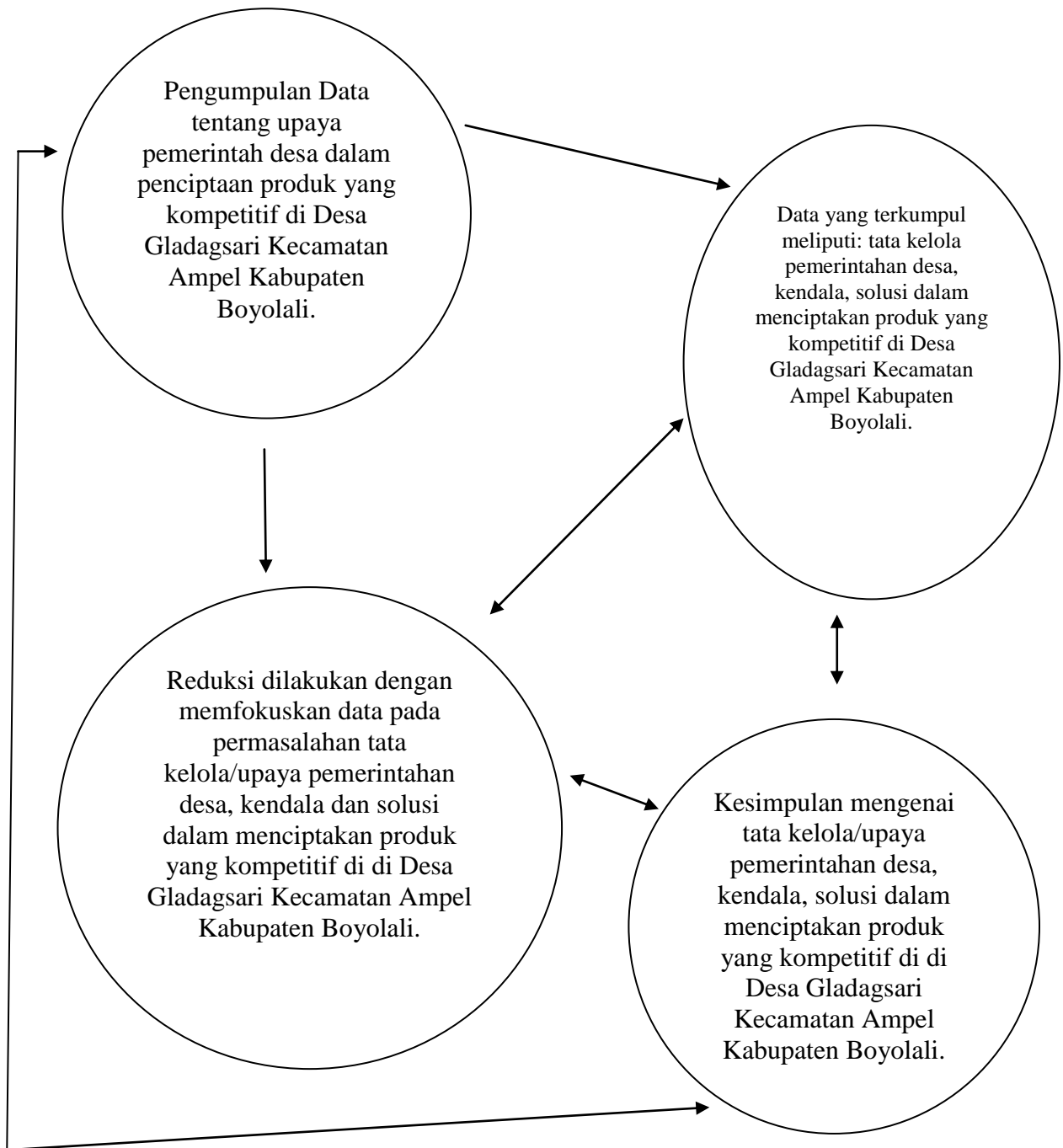
2. METODE

Penelitian dilakukan di Desa Gladaagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Subyek Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat yang mempunyai usaha rumah (*home industry*) serta Tokoh masyarakat Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Objek penelitian ini adalah tata kelola pemerintah desa dalam penciptaan pasar yang kompetitif. Kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik model analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Bagan analisis interaktif dalam penelitian dapat digambarkan pada bagan 1 di bawah ini.



Bagan 1. Bagan Kerangka Pemikiran model interaktif Miles dan Huberman.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola pemerintahan desa dalam penciptaan pasar yang kompetitif di Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali berikut kendala dan solusinya. Berdasarkan indikator yang digunakan dapat ditemukan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam penciptaan pasar yang kompetitif. walaupun sudah berusaha memberikan program-program secara optimal namun masih terdapat kendala dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dalam penciptaan pasar yang kompetitif mulai dari perangkat desa yang kurang dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada para pemilik industri rumah tangga, selain itu mencul dari pemilik industri rumah tangga yang kurang memperhatikan kualitas produk, masih berbuat curang serta belum mempunyai surat izin usaha. Hasil observasi dan penelitian disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Penelitian

Rumusan Masalah	Indikator	Hasil Temuan
1. Upaya Pemerintah Desa Gladagsari dalam Penciptaan Produk yang Kompetitif.	1. Penyempurnaan Mekanisme Pasar.	Pemerintah Desamemberikan sosialisasi kepada pemilik industri rumah tangga.
	2. Peningkatan Peran Usaha Kecil di Bidang Industri Rumah Tangga.	Pemerintah Desa memberikan bantuan kepada pemilik <i>home industry</i> ..
	3. Penentuan deregulasi (proses tindakan penghapusan pembatasan atau tindakan peniadaan peraturan).	Pemerintah desa berusaha memperbaiki berbagai peraturan.
	4. Kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.	1. Pemerintah Desa berkerjasama dengan Kabupaten Boyolalimendirikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) BKK Boyolali. 2. Pemerintah desamendirikan pusat

		pertokoan di Gladagsari.
2. Kendala dan Solusi upaya Pemerintah Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dalam Penciptaan Pasar yang Kompetitif.	1. Penyempurnaan Mekanisme Pasar.	<p>Kendala kurangnya partisipasi warga untuk hadir saat sosialisasi di kantor Desa Gladagsari.</p> <p>Solusi Pemerintah Desa Gladagsari perlu melakukan langkah aktif dalam sosialisasi dengan menghadiri kegiatan di masyarakat. Serta Pemerintah Desa Gladagsari perlu membuat papan pengumuman di setiap RT untuk memberikan informasi terkait penyempurnaan mekanisme pasar guna mewujudkan pasar yang kompetitif</p>
	2. Peningkatan Peran Usaha Kecil di Bidang Industri Rumah Tangga.	<p>Kendalanya Pemilik industri rumah tangga masih kurang memperhatikan kualitas barang produksinya. Beberapa peralatan yang digunakan juga masih manual (sederhana). solusinya Perlu adanya kerjasama antara perangkat desa dengan Ketua RT untuk memberikan arahan kepada pemilik industri agar memperhatikan kualitas produknya. Selain itu Pihak kelurahan perlu mengadakan pelatihan kepada pemilik home industry dalam pemanfaatan teknologi, dengan melibatkan para ahli (akademisi)</p>
	3. Penentuan deregulasi (proses tindakan penghapusan pembatasan atau tindakan peniadaan peraturan).	<p>Kendalanya Pemilik industri rumah tangga masih ada yang belum memiliki surat ijin usaha. Pemilik industri rumah tangga ada yang berbuat curang.</p> <p>Solusinya Pemerintah Desa Gladagsari harus membantu pemilik industri rumah tangga yang sedang mengurus perizinan dengan</p>

		segala kemudahan. Pemerintah Desa Gladagsari bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatasi pemiliki industri rumah tangga yang curang dalam produksinya.
	4. Kemampuan pemerintah Desa dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.	Kendalanya Masyarakat Desa Gladagsari masih meminjam uang kepada bank titil (bank keliling). Pembangunan pusat pertokoan di Desa Gladagsari yang masih terhambat perijinanya. Solusinya Pemerintah Desa Gladagsari perlu meningkatkan progam-progam yang menarik agar masyarakat bersedia menjadi nasabah Bank BPR BKK Boyolali. Pemerintah Desa Gladagsari bekerjasama dengan pihak Kabupaten untuk segera mengurus perijinan ke pihak pertanahan agar pembangunan pusat pertokoan di Gladagsari dapat kembali terlaksana dengan lancar.

4. PENUTUP

Pemerintah desa sudah melaksanakan upaya dan tanggung jawabnya sesuai dengan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam penciptaan pasar/produk yang kompetitif. walaupun sudah berusaha memberikan progam-progam secara optimal namun masih terdapat kendala dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dalam penciptaan pasar yang kompetitif.

PERSANTUNAN

Skripsi ini bukan hanya usaha dan doa Penulis semata, namun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak guna menyelesaikan Skripsi ini. Maka, dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
2. Ibu Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak Dr. Ahmad Muhibbin, M. Si., selaku Ketua Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Drs.Achmad Muthali'in, M.Si., selaku Sekertaris Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus yang memberikan rekomendasi persetujuan judul dan memberi arahan serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Agus Prasetyo, S.Pd, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan arahan serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Dwi Yuliana. (2013). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005 (studi kasus Desa Tarubasan Kecamatan Karangananom Kabupaten Klaten)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi.2006.*prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, edisi revisi IV*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Darmastuti.Ari.(2014) *Local Autonomy and Intersektor Peformance,Based, Governance in Lampung Province*. Universitas Lampung.
- Hardiyansyah.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Inskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Ciputat Mega.

Jogiyanto.2008.*metodologi penelitian sistem informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kamal, Romle dan Yusof (2015). *Good Governance and Organization Performance in Public Sector : A Porposed Framework*. Internasional Journal of Administration and Governance.

Kasmadsi.Rulinawaty. (2015).*Democratic Model of Public Policy Accuntabilty, Case Study on Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makasar City*.Universitas Muhammadiyah Makasar.

Kurlinawati, Fransiska (2009). *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Universitas Sumatra Utara Medan.

Stankowska, Magdalena. 2014. *Good Governance and the Non-Govermental Organization*. Internasional Journal of Govermental Financial Management.

Tim Penyusun,.2014. *pedoman penulisan skripsi FKIP*. Surakarta: Badan Penerbit FKIP UMS.

Triki, dan Chun. (2011). *Does Good Governance Create Value for Internasional Acquirers in Afrika: Evidence from US Acquisitions*. African Development Bank.